

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

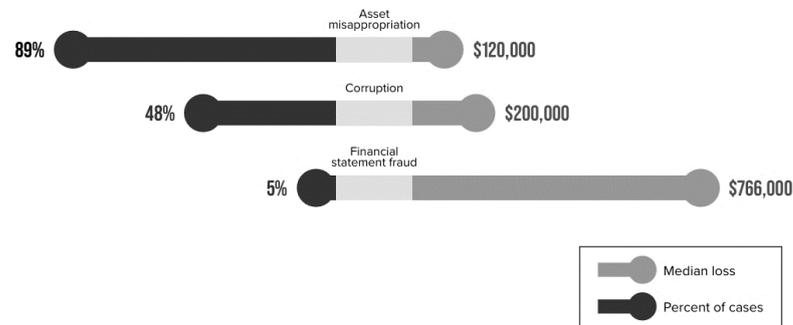
Semua perusahaan yang telah masuk dan menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia (BEI) diharuskan untuk menerbitkan informasi *financial* mereka dalam bentuk laporan keuangan kepada masyarakat umum (publik). Ini adalah salah satu cara perusahaan bertanggung jawab dengan menerapkan transparansi kepada pengguna laporan keuangan. Berdasarkan pengertian yang dikutip dari PSAK Nomor 1, laporan keuangan merupakan gambaran yang terorganisasi dari situasi dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memiliki tujuan dasar untuk memberikan informasi yang berarti kepada sebagian besar pengguna laporan ekonomi, mulai dari informasi arus kas, kinerja, dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan akuntabilitas manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan untuk dikelola.

Laporan keuangan juga dimanfaatkan untuk menilai seberapa baik manajemen menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola kegiatan bisnis, yang membuatnya sangat membantu para pemangku kepentingan dan pengguna lain untuk membuat keputusan keuangan dan ekonomi. Adanya evaluasi kinerja ini memotivasi manajemen untuk menjalankan operasi bisnis seefisien mungkin sehingga dapat memberi tahu para pemangku kepentingan bahwa perusahaan telah berjalan dengan baik

(Triyani *et al.*, 2019). Oleh karena itu, perusahaan yang telah *go public* menginginkan gambaran kondisi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan selalu dalam keadaan yang terbaik guna meningkatkan nilai perusahaan (Kardhianti & Srimindarti, 2022), untuk memenuhi ekspektasi pasar sehingga dapat menjaga dan meningkatkan harga saham (Albrech *et al.*, 2024) juga memudahkan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan (Beaver, 2022). Hal inilah yang mendorong terjadinya praktik kecurangan pada laporan keuangan.

Penyajian dan pengungkapan yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen dengan maksud menyesatkan pengguna laporan keuangan dianggap sebagai teknik kecurangan atau manipulasi dalam pelaporan keuangan. Saat ini, pengguna laporan keuangan mengkhawatirkan maraknya kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan publik yang dapat memengaruhi arah kondisi ekonomi mereka dan stabilitas ekonomi dunia (Faradiza, 2019). Runtuhnya konglomerat dengan pengaruh global, seperti skandal besar yang mendunia dari perusahaan *World.Com*, *Enron Corp.*, dan *Global Crossing*, merupakan contoh kecurangan dalam laporan keuangan yang berujung pada kebangkrutan dan kerugian miliaran dolar (Sari & Husadha, 2020).

**Gambar 1.1 Frekuensi dan Kerugian Berdasarkan Jenis *Fraud***



Sumber : ACFE, 2024b

Berdasarkan data ACFE *Report to the Nations 2024*, hanya karena 5% kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi, kerugian yang dialami perusahaan mencapai \$766,000, paling tinggi dibanding jenis kecurangan lain yang memiliki frekuensi tinggi yaitu penyalahgunaan aset dan kasus korupsi. Hal ini menambahkan bukti bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan jenis kecurangan yang paling membahayakan dan merugikan perusahaan sehingga dapat memicu kebangkrutan.

Tindakan kecurangan marak terjadi pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor energi. Gas alam, minyak, batu bara, listrik, panas bumi, tenaga surya, angin, dan bentuk energi lainnya semuanya diproduksi, didistribusikan, dan dijual oleh perusahaan industri sektor energi. Karena bisnis energi beroperasi secara global, permintaan energi diperkirakan akan terus meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan populasi yang juga terus bertambah dan perkembangan ekonomi (Muhammad, 2023). Selain mendukung perekonomian nasional, industri energi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga, sehingga sektor ini menjadi sektor yang memainkan peran krusial dan penting

untuk dikembangkan. Oleh karena potensinya yang besar, sektor ini tidak kalah dengan sektor lain untuk menjadi pilihan yang menguntungkan bagi para investor (Adi, 2024). Dari alasan tersebut, industri energi menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan survei ACFE 2024, telah terjadi 78 kasus kecurangan dengan *median loss* sebesar \$152,000 dimana 4% penyumbanganya berasal dari kecurangan laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan adanya masalah dari laporan keuangan SKK Migas. Dari 20 LHP yang diperiksa terdapat 178 temuan senilai Rp41,75 triliun, 291 juta dolar AS dan 6,8 juta euro (Purwantono, 2024). Selain itu, adanya temuan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) yang dalam operasionalnya hingga tahun 2022 mencatat pendapatan hanya US\$3.569 juta, sedangkan nilai liabilitasnya lebih besar yaitu US\$3.753 juta. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan ada 16 temuan penyimpangan dalam penggunaan anggaran untuk sejumlah proyek yang berujung pada kerugian keuangan negara. Salah satu penyimpangan ditunjukkan dengan akuisisi tiga wilayah kerja migas, dimana BPK menyebut bahwa nilai akuisisi yang tertera di laporan keuangan anak perusahaan PGN, yaitu PT Saka Energi Indonesia (SEI) lebih tinggi hingga US\$ 56,6 juta atau sekitar Rp 852 miliar (Trianita, 2024).

Melihat besarnya dampak dari kecurangan laporan keuangan, perusahaan-perusahaan di dunia mencoba menerapkan sistem untuk menekan frekuensi dan celah terjadinya praktik kecurangan ini. Salah satu

dari banyaknya cara yang dapat diimplementasikan perusahaan dalam upaya memberantas dan meminimalisir kemungkinan munculnya praktik manipulasi dalam proses pembuatan laporan keuangan adalah dengan menciptakan prosedur dan sistem kelola yang baik (Sinaga & Arief, 2023).

*Corporate governance* adalah salah satu sistem di perusahaan yang penerapannya telah diwajibkan, khususnya bagi perusahaan *go public* dan telah dipercaya untuk melakukan kegiatan pemantauan atau monitoring terhadap tingkah laku manajemen (Jao Robert *et al.*, 2023). Salah satu kepercayaan mayoritas tentang *corporate governance* adalah semakin baik dan efektifnya penerapan sistem tata kelola perusahaan akan mengarah pada peningkatan integritas laporan keuangan yang dipublikasi oleh perusahaan (Ananda, 2020). Maraknya pengungkapan kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia telah membuktikan bahwa adanya penerapan sistem *corporate governance* yang tidak efektif oleh perusahaan atau sistem perusahaan itu sendiri yang masih kurang baik (Feby Priswita, 2019). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebutan untuk sistem tata kelola perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan (Sukanto, 2020). Oleh karena itu, untuk menghentikan dan mencegah manajer terlibat dalam kecurangan pelaporan keuangan, tata kelola perusahaan yang efektif sangat penting untuk diimplementasikan. Telah dibuktikan, bahwa penggunaan tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. (Kurniawan & Reskino, 2023).

Dalam mekanisme tata kelola perusahaan, terdapat dewan komisaris yang bertugas untuk memonitor bagaimana kualitas dan integritas informasi yang tertera dalam laporan keuangan. Mulyadianto (2020) menemukan hasil bahwasannya performa dewan komisaris mampu mengurangi kecurangan laporan keuangan. Umumnya, dalam departemen dewan komisaris akan dibentuk personel dewan komisaris yang bersifat independen. Mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keanggotaan dewan komisaris dan berasal dari luar organisasi. Banyaknya persentase anggota komisaris independen menurut peraturan OJK adalah minimal 30% dari keseluruhan personel dewan komisaris (OJK, 2015). Sudarman *et al.* (2019) serta Marzuki dan Majid (2024) membuktikan bahwa jika tingkat independensi komisaris perusahaan tinggi, maka kecurangan dalam suatu perusahaan akan kecil, hasil temuan mereka turut ditunjang oleh penelitian Nasir *et al.* (2019) yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa perusahaan yang pernah terjerat kasus kecurangan secara signifikan meningkatkan proporsi direktur independen di dewan mereka. Fitri *et al.* (2019) juga menopang pernyataan ini dengan menambahkan fakta bahwa perusahaan yang telah terbukti melakukan manipulasi cenderung mempunyai ukuran komisaris independen yang kecil. Hasil studi ini berbeda dengan yang diutarakan Indrati *et al.* (2021) dalam penelitiannya dengan menemukan bahwa proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam laporan keuangan dan berasumsi bahwa dewan komisaris menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada komite audit.

Saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, para dewan komisaris memang akan mendapat dukungan dari komite audit. Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk mendukung komisaris, terutama untuk tugas pemantauan laporan keuangan. Kurnia (2023) membuktikan bahwa efektivitas komite audit akan menekan frekuensi dan banyaknya probabilitas kemungkinan terjadinya praktik manipulasi dalam laporan keuangan. Dengan menciptakan keanekaragaman yang besar, komite audit akan memperluas perspektif, keterampilan, pembelajaran dalam tim serta pengalaman untuk meningkatkan keahlian kolektif komite dalam pengawasan keuangan. Selain itu, besarnya ukuran komite mendorong pengalokasian sumber daya yang efisien, baik itu dari segi biaya, tenaga, maupun waktu untuk memastikan pengawasan yang komprehensif terhadap praktik pelaporan keuangan. Kehadiran beberapa anggota komite meningkatkan kemungkinan mengidentifikasi penyimpangan, mendorong keterbukaan, dan menjadi tantangan yang perlu diperhatikan manajemen untuk melakukan kecurangan (Bii, 2024). Hasil ini didukung oleh penelitian Putri *et al.* (2024) yang ikut berkesimpulan bahwa *internal fraud* sangat dipengaruhi oleh jumlah keanggotaan komite audit. Sejalan dengan penelitian tersebut, Putra (2023) juga membuktikan bahwa jumlah komite audit dapat memperlemah pengaruh-pengaruh pada *fraud hexagon* terhadap *fraudulent financial reporting*. Namun, studi lain yang diselesaikan oleh Syafitri *et al.* (2021) serta Kardhianti dan Srimindarti (2022) memberikan hasil yang bertolak belakang,

dimana mereka mendapatkan hasil bahwa kecurangan laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh variabel jumlah komite audit.

Komite audit juga diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat rutin minimal 4 kali dalam 1 tahun (OJK, 2015), diharapkan bahwa pelaksanaan rapat rutin ini akan meningkatkan pelaksanaan kewajiban komite audit untuk mengawasi prosedur pelaporan keuangan dan meningkatkan integritas pelaporan keuangan. Hal ini ditegaskan kembali dengan hasil penelitian Purwiyanti dan Herry Laksito (2022) serta Sijabat dan Tamba (2021) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat yang dijalankan oleh komite audit dapat mempengaruhi dengan mengurangi frekuensi terjadinya kecurangan laporan keuangan secara signifikan. Temuan ini berbanding terbalik dengan temuan Sinaga dan Arief (2023) yang tidak menemukan adanya pengaruh dari banyaknya rapat departemen komite audit.

Dalam pelaksanaannya, komite audit dapat berkoordinasi dengan departemen audit internal untuk meninjau dan mendiskusikan kinerjanya guna mendorong pemantauan yang baik. Tanggung jawab audit internal meliputi proses untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melacak probabilitas terjadinya manipulasi yang kemudian menyelesaikannya melalui audit dan investigasi (The IIA, 2019). Dengan menurunkan kesalahan pelaporan, audit internal dianggap mampu meningkatkan pengendalian internal, yang pada gilirannya meningkatkan mutu laporan keuangan bisnis. Hal ini berkontribusi dalam mendukung penelitian Marfiana dan Gunarto (2021) serta Harefa (2023) yang menyatakan bahwasannya departemen audit internal berperan

penting dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan dengan memperkuat kontrol perusahaan atas kesalahan, penyimpangan, dan penipuan. Namun, Sari dan Husadha (2020) mendapatkan hasil bahwa tugas audit internal di perusahaan bersifat evaluatif terhadap kegiatan operasional sehingga cenderung terlambat dalam menemukan indikasi *fraud*. Hal ini diperkuat dengan konflik kepentingan di dalam departemen yang turut menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana kinerja audit internal.

Lebih jauh, audit internal saja tidak cukup untuk memastikan kualitas mutu laporan keuangan. Oleh karena itu, digunakanlah pihak auditor eksternal. Audit eksternal sendiri menjadi proses yang sangat penting bagi pengawasan dan pengauditan informasi keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak auditornya yang berasal dari luar sehingga tidak memihak dan memiliki independensi penuh. Auditor eksternal dipekerjakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertugas untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya dengan berpatokan penuh pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Sari & Husadha, 2020).

Secara keseluruhan, ada 4 KAP yang dikenal sebagai *the Big 4*, ke empat KAP tersebut adalah KAP *Pricewaterhouse Coopers (PwC)*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *Ernst & Young (EY)* dan *Klynveld, Piet, Marwick & Goerdeler (KPMG)*. Karena auditor yang berukuran besar tidak bergantung pada perusahaan yang diauditnya, KAP *Big 4* disebut-sebut mampu memberikan audit yang lebih berkualitas daripada KAP *non-Big 4*. Ukuran

KAP yang besar mencerminkan bahwa auditor yang bekerja pada KAP tersebut mampu bertindak lebih independen dan profesional terhadap klien (Marlindah & Wahyono, 2020), sehingga laporan keuangan hasil audit KAP *Big 4* lebih dipercaya bebas dari tindakan manipulasi. Penelitian Andira (2024) dan Rohmatin *et al.* (2021) mendukung hal tersebut dan menyimpulkan bahwa kualitas KAP mempengaruhi kecurangan laporan keuangan secara negatif, sehingga mampu menurunkan risiko terjadinya manipulasi. Namun, pernyataan ini tidak senada dengan temuan dari studi Sari *et al.* (2020) yang memperlihatkan bahwa KAP *Big 4* sebagai variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan.

Kemudian, selain variabel *corporate governance*, penulis juga menambahkan variabel independen lain yaitu ukuran perusahaan dan *leverage* yang juga memiliki kontribusi dalam mempengaruhi kecurangan laporan keuangan (Andini, 2023).

Ukuran perusahaan dikenal sebagai teknik umum dalam membagi suatu bisnis menjadi dua kategori—besar dan kecil. Karena perusahaan yang lebih besar harus mampu memenuhi harapan investor atau pemegang sahamnya, ukuran perusahaan dapat memengaruhi preferensi terjadinya manipulasi laporan keuangan. Studi oleh Kakati dan Goswami (2019) menyimpulkan bahwa ukuran dari perusahaan ini berpengaruh negatif terhadap kecurangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan kecil memiliki kecenderungan untuk menjalankan praktik kecurangan demi menarik dan menyenangkan investor. Hal ini didukung oleh Wang *et al.* (2019) dalam studinya yang

mengungkapkan perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki ukuran yang lebih kecil. Perusahaan besar menarik perhatian banyak orang sehingga cenderung untuk menjaga reputasinya sehingga probabilitas untuk melakukan manipulasi lebih rendah (Xiong *et al.*, 2021). Namun, pernyataan ini tidak didukung oleh Siswanto (2020) dan Ananda (2020) yang dalam penelitiannya tidak memperlihatkan relasi apa pun dari ukuran perusahaan dengan kecurangan laporan keuangan.

Variabel selanjutnya adalah *Leverage*. Mendapatkan sumber dana dari utang atau meminjam uang untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas dikenal sebagai *leverage*. Penggunaan pinjaman yang berlebihan akan menjerat bisnis dan membuatnya sulit untuk meringankan beban atas pinjaman tersebut. Manajemen kemudian berada di bawah tekanan yang lebih besar sebagai akibatnya, yang memotivasi mereka untuk terlibat dalam teknik pelaporan keuangan yang tidak jujur (Mardianto & Tiono, 2019). Perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki tekanan *leverage* yang besar (Fitri *et al.*, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian Sari dan Irawati (2021), Kakati dan Goswami (2019) juga Puspitanigrum *et al.* (2019) yang menemukan bahwa tekanan eksternal yang di proksikan oleh *leverage* dengan bantuan *Debt to Asset Ratio* (DAR) berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan secara signifikan. Memakai metode yang sama, penelitian yang dilakukan Ananda (2020) dan Richmayati (2020) menunjukkan hasil yang berbeda dengan mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang memuat beberapa masalah dan fenomena yang ada saat ini, pertentangan temuan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, serta contoh kasus nyata yang telah dijabarkan di atas, penulis kemudian termotivasi untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri komposisi dewan komisaris independen, efektivitas komite audit, efektivitas audit internal dan kualitas auditor eksternal, variabel ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, poin-poin rumusan masalah yang didapatkan adalah:

- 1) Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?
- 2) Apakah efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?
- 3) Apakah efektivitas audit internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?
- 4) Apakah kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?
- 5) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?

- 6) Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap kecurangan dalam laporan keuangan?

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibuat agar penelitian ini tidak keluar dari tujuan awalnya, sehingga peneliti memutuskan untuk memberikan batasan masalah yang akan diteliti menjadi sebagai berikut :

1. Objek dari penelitian ini adalah pengaruh *corporate governance* yang terdiri dari variabel komposisi dewan komisaris independen, efektivitas komite audit, efektivitas audit internal serta kualitas auditor eksternal, kemudian ditambah dengan variabel ukuran perusahaan dan *leverage*.
2. Subjek penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan pada industri sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode penelitian ini adalah 3 tahun yaitu tahun 2021-2023.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan topik yang diteliti mengenai:

- 1) Pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.
- 2) Pengaruh efektivitas komite audit terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.
- 3) Pengaruh efektivitas audit internal terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.

- 4) Pengaruh kualitas auditor eksternal terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.
- 5) Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.
- 6) Pengaruh *leverage* terhadap kecurangan dalam laporan keuangan.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan bagi penulis tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dari komposisi dewan komisaris independen, efektivitas komite audit, efektivitas audit internal dan kualitas auditor eksternal, beserta variabel ukuran perusahaan dan *leverage* dalam menekan kecurangan pelaporan keuangan.

#### b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literasi yang memberikan *insight* bagi perusahaan dalam menentukan bagaimana sistem *corporate governance* yang sesuai untuk menekan risiko kecurangan laporan keuangan, serta mengetahui bagaimana variabel lain yaitu ukuran perusahaan dan *leverage* dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan.

### 2. Manfaat Akademis

#### a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan manfaat teoritis mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dari komposisi dewan komisaris independen, efektivitas komite audit, efektivitas audit internal dan kualitas auditor eksternal, beserta variabel ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan panduan bagi penelitian di kemudian hari sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya untuk tema kecurangan laporan keuangan

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika dari beberapa bab yang meliputi:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Untuk bab pertama ini akan dijelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah yang didapatkan, ruang lingkup sebagai pembatas masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat, serta sistematika penulisan.

### **BAB II                 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjadi bab penjelas mengenai landasan teori yang dipakai, penelitian oleh peneliti terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

**BAB III            METODE PENELITIAN**

Bab ini memberikan uraian mengenai pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, teknik pengambilan sampel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

**BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat inti proses penelitian, dimana akan dibahas mengenai hasil yang didapat dari proses analisis data beserta interpretasinya.

**BAB V            KESIMPULAN**

Pada bab terakhir memuat kesimpulan yang dapat ditarik dan saran yang diajukan berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya.